

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Sejarah Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Sejarah terbentuknya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berawal sejak zaman penjajahan Belanda. BPR di Indonesia dimulai sejak abad 19 dengan berdirinya Bank Kredit Rakyat (BKR) dan Lumbung Desa, yang dibangun dengan tujuan membantu petani, pegawai, buruh, agar dapat melepaskan diri dari jeratan para rentenir yang membebani dengan bunga yang tinggi.

Pada masa pemerintahan koloni Belanda, BPR dikenal oleh masyarakat dengan Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani, dan Bank Dagang Desa, yang saat itu hanya ada di Jawa dan Bali. Pada tahun 1929 berdiri badan yang menangani kredit dipedasaan yaitu, Badan Kredit Desa (BKD) yang berdiri di Jawa dan Bali, sementara untuk pengawasan dan pembinaan, Pemerintah Kolonial Belanda membentuk Kas Pusat dan Dinas Perkreditan Rakyat, dengan nama lembaga Instansi Kas Pusat (IKP).

Pada masa setelah Indonesia merdeka, pemerintah mendorong pendirian bank-bank pasar yang terutama sangat terkenal karna di dirikan di lingkungan pasar dan bertujuan untuk memberikan pelayanan jasa keuangan kepada pedagang pasar. Bank-bank pasar terssebut kemudian tahun 1988 dikukuhkan menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sejak itu BPR di Indonesia tumbuh pesat.

Bank-bank yang didirikan antara tahun 1950-197 didaftarkan sebagai Perseroan Terbatas (PT), CV, Koperasi, Maskapai Andil Indonesia, Yayasan dan Perkumpulan. Pada masa itu terdiri dari beberapa lembaga keuangan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, Bank Karya Produksi Desa (BKPD) di provinsi Jawa Barat, Badan Kredit Kecamatan (BKK) di provinsi Jawa Tengah, Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK) di provinsi Jawa Timur, Lumbung Pitih Negeri (LPN) di provinsi Sumatera Barat, dan Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) di provinsi Bali. Pada tanggal 27 Oktober 1988 pemerintah menetapkan kebijakan diregulasi perbankan yang dikenal sebagai Pakto 88. sebagai kelanjutan dari Pakto 88, Pemerintah mengeluarkan beberapa paket perbankan sebagai penyempurnaan dari paket sebelumnya.

Sejalan dengan itu, pemerintah menyempurnakan UU No.14 Th.1967 Tentang pokok-pokok perbankan, dengan mengeluarkan undang-undang No.7 TH.1992 tentang perbankan. Undang-undang tersebut di sempurnakan dalam UU No.10 Th 1998. Dalam UU ini secara tegas ditetapkan bahwa jenis bank di Indonesia adalah Bank Umum dan BPR.

Sekitar tahun 1987-1988, terjadi urbanisasi besar-besaran akibatnya perkembangat perekonomian kota Jakarta sangat pesat. Sedangkan di daerah-daerah lain sangatlah lambat dan hampir tidak berkembang. Dari kondisi tersebut, PT. NUSAMBA membantu pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemerataan ekonomi dengan cara mendirikan bank pada awal Februari pada tahun 1990. BPR Nusamba di dirikan secara serentak di pulau Jawa dan

Bali sebanyak 20 kantor pusat. Pada sekitar akhir tahun 2005 terdapat 38 kantor pelayanan dan pada tahun 2006 bertambah menjadi 70 kantor pelayanan, sedangkan target tahun 2007-2008 adalah lebih dari 100 kantor.

a. Kepemilikan BPR

1. BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikinya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikinya warga negara Indonesia, dan pemerintah daerah.
2. BPR yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tentang perkoperasian yang berlaku.
3. BPR yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama.
4. Perubahan kepemilikan BPR wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.
5. Merger dan konsolidasi antara BPR, serta akuisisi BPR wajib mendapat izin Merited Keuangan sebelumnya setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Ketentuan mengenai

merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

b. Pembinaan dan Pengawasan BPR

Pembinaan dan pengawasan bank pada umumnya terdapat dalam UU Pokok Perbankan No 7 tahun 1992 Bab V tentang Pembinaan dan Pengawasan sebagai fungsi dari Bank Indonesia.

Pengawasan Bank Indonesia terhadap BPR :

1. Pemberian bantuan dan layanan perbankan kepada lapisan masyarakat yang rendah yang tidak terjangkau bantuan dan layanan bank umum, yaitu dengan memberikan pinjaman kepada pedagang dan pengusaha kecil di desa dan di pasar agar tidak terjerat rentenir.
2. Membantu pemerintah dalam ikut mendidik masyarakat guna memahami pola nasional dengan adanya akselerasi pembangunan.
3. Penciptaan pemertaan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

c. Pengaturan dan Pembagian Tugas BPR, KUD dan BRI

1. BPR yang terdapat di desa sebagai pengganti Bank Desa, kedudukannya ditingkatkan ke kecamatan dan diadakan penggabungan Bank desa yang ada dan kegiatannya siarahkan kepada layanan kebutuhan kredit kecil untuk pengusaha,

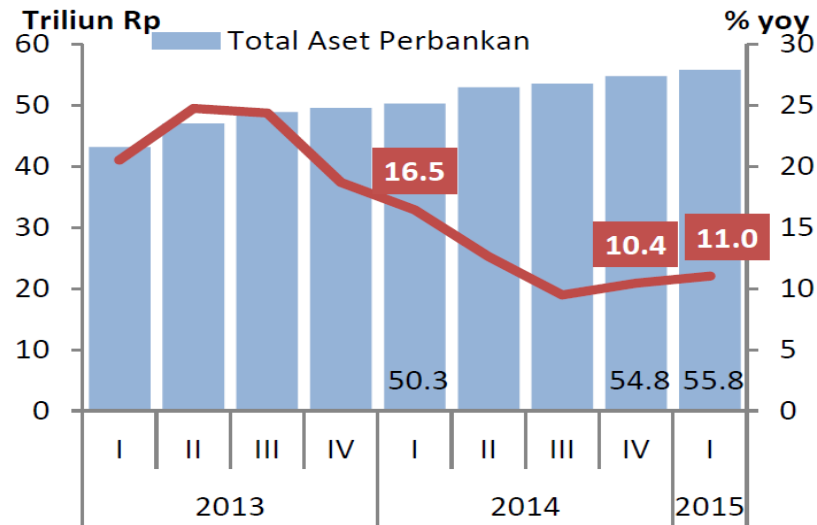
pengrajin, pedagang kecil, atau kepada mereka yang tinggal dan mempunyai usaha di desa tersebut tetapi tidak atau belum menjadi anggota KUD dan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2. BPR yang ditetapkan di daerah perkotaan yaitu Bank Pasar, Bank Pegawai atau bank sejenis yang melayani kebutuhan kredit pengusaha, pedagang di pasar dan di kampung. Sumber pembiayaan kredit ini yaitu berasal dari dana masyarakat yang dihimpun dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
3. KUD bekerja sebagai lembaga perkreditan kecil di desa yang memberikan pinjaman kepada petani, peternak, dan nelayan yang telah menjadi anggotanya. Dana pemberian kredit berasal dari dana yang dihimpun dari anggota KUD dan kredit yang disalurkan oleh BRI dan BI.
4. BRI melayani langsung kredit yang relatif besar atau kredit yang dipinjamkan kepada pengusaha menengah di pedesaan dan di perkotaan.

## **B. Perbankan Provinsi Lampung**

Kinerja perbankan provinsi Lampung mengalami perkembangan yang melambat sebagaimana tercermin dari penurunan pertumbuhan penyaluran kredit, penurunan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) serta peingkatan kredit. Pertumbuhan penyaluran kredit tercatat sebesar 8,3% (yoy) menjadi Rp 47,6 triliun, sementara resiko kredit atau *Non Performing Loans* (NPL) meningkat menjadi 2,2%. Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 14,3% (yoy) menjadi Rp33,1 triliun. Dengan pertumbuhan penyaluran kredit yang melambat diiringi dengan pertumbuhan DPK yang sedikit lebih tinggi, maka pada triwulan I 2015 kinerja intermediasi perbankan provinsi Lampung menurun dari 147,9% menjadi 143,6%. Perkembangan system pembayaran di provinsi Lampung pada triwulan I 2015, khususnya sistem pembayaran non tunai menunjukkan adanya pelambatan pertumbuhan sejalan dengan kondisi perekonomian yang belum terakselerasi.

Indikator perbankan di provinsi Lampung menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan bisnis perbankan di awal tahun 2015. Aset perbankan di provinsi Lampung tumbuh sebesar 11,0% (yoy) atau mencapai Rp 55,8 triliun, meningkat dibandingkan triwulan IV 2014 yang tumbuh sebesar 10,4% atau mencapai Rp 54,8 triliun.



Sumber : LBU dan LBPR, 2015

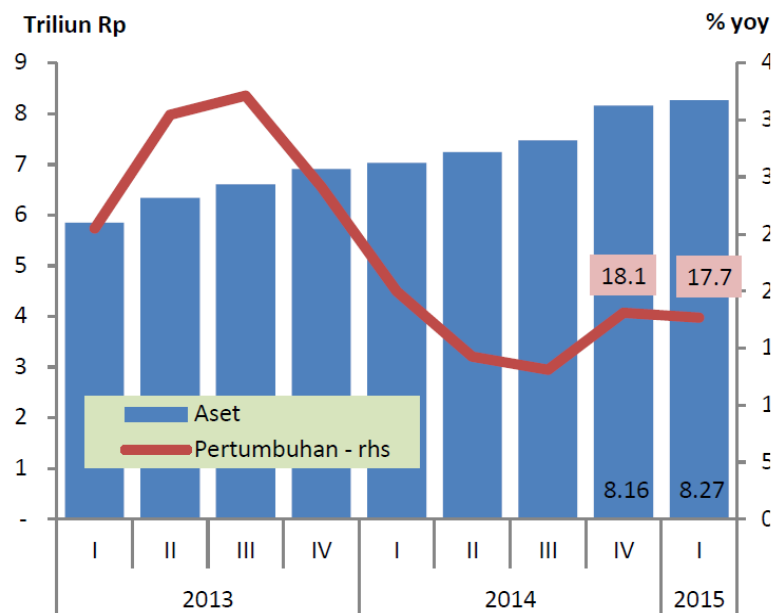
**Grafik 4.1**  
Perkembangan Aset Perbankan  
di Provinsi Lampung

Sementara itu, penyaluran kredit perbankan di provinsi Lampung pada triwulan laporan mencapai Rp 47,6 triwulan atau tumbuh sebesar 8,3% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang mencapai 11,5% (yoy). Berbeda dengan penyaluran kredit, penghimpunan DPK mencapai Rp 33,1 triliun, tercatat mengalami peningkatan pertumbuhan dari 111,9% (yoy) pada triwulan IV 2014 menjadi 14,3% (yoy) pada triwulan 2015. Sementara itu, ditengah performa peyaluran kredit yang melambat dan penghimpunan dana yang meningkat, kinerja fungsi intermediasi dan kualitas penyaluran kredit mengalami penurunan dibandingkan triwulan IV 2014. Loan to Deposit Ratio (LDR) mengalami penurunan dari 147,9% menjadi

143,6% sementara Non Performing Loans (NPL) mengalami peningkatan menjadi dari 2,0% menjadi 2,2%.

### C. Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Provinsi Lampung

Aset BPR di provinsi Lampung pada triwulan I 2015 mencapai Rp 8,27 triliun sebesar 17,7% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 18,1% (yoy) pada grafik.

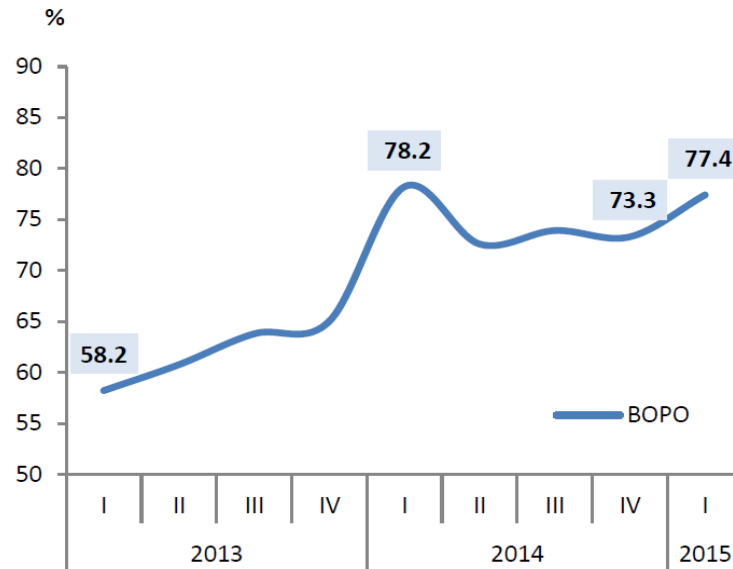


Sumber : LBPR, 2015

**Grafik 4.2**  
Perkembangan Aset BPR

Setara dengan perkembangan asset, penyaluran kredit oleh BPR di provinsi Lampung pada triwulan IV 2014 juga mengalami penurunan dari 18,0% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 15,6% (yoy) pada triwulan laporan, dengan nominal mencapai Rp 6,96 triliun pada grafik.





Sumber : LBPR, 2015

**Grafik 4.3**  
Perkembangan BOPO BPR

Rasio BOPO pada BPR Lampung terlihat dalam grafik diatas bahawa pada triwulan I tercatat sebesar 77,4%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 73,3 %. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi BOPO maka semakin tinggi beban operasionalnya yang ditanggung BPR yang akhirnya dapat berimbas pada tingginya suku bunga kredit.

Di provinsi Lampung pada setiap kabupaten dan kota masing-masing mempunyai tingkat kinerja yang berbeda-beda. Dibawah ini merupakan tabel kinerja BPR konvensional di provinsi Lampung.

**Tabel 4.3**  
Kinerja BPR Konvensional  
di Provinsi Lampung 2015

No.	Kabupaten/Kota	CAR	LDR	BOPO	ROA	ROE	NPL
1	Kab. Lampung Timur	27.97%	75.60%	27.61%	2.02%	47.25%	0.35%
2	Kab. Way Kanan	0.00%	0.00%	20.61%	1.60%	0.00%	0.76%
3	Kab. Lampung Barat	0.00%	0.00%	13.81%	1.52%	0.00%	0.41%
4	Kab. Lampung Selatan	24.81%	85.61%	27.01%	1.95%	103.71%	0.13%
5	Kab. Lampung Tengah	23.45%	72.97%	28.33%	1.70%	23.64%	0.84%
6	Kab. Lampung Utara	31.01%	90.07%	35.92%	2.75%	26.63%	0.46%
7	Kab. Mesuji	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
8	Kab. Pesawaran	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
9	Kab. Pringsewu	0.00%	0.00%	40.44%	3.92%	0.00%	1.99%
10	Kab. Tanggamus	0.00%	0.00%	24.40%	2.48%	0.00%	0.66%
11	Kab. Tulang Bawang	30.97%	68.10%	19.12%	2.33%	50.17%	1.34%
12	Kab. Tulang Bawang Bar	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
13	Kab./Kota Lainnya	0.00%	0.00%	2178.72%	143.67%	0.00%	459.06%
14	Kota Metro	22.05%	85.26%	194.99%	1.53%	25.61%	0.82%
15	Kota Bandar Lampung	35.52%	77.94%	96.45%	2.43%	23.77%	3.00%

Sumber : Bank Indonesia, 2015

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat persentase CAR, LDR, BOPO, ROA, ROE, dan NPL. Pada tahun 2015 di provinsi lampung persentase yang tetinggi kecuali kabupaten /kota lainnya, terdapat di kota Bandar Lampung dengan CAR sebesar 35.52%. kemudian yang terendah yaitu terdapat di 7 kabupaten yaitu Way Kanan, Lampung Barat, Mesuji, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus dan Tulang Bawang Barat yaitu masing-masing sebesar 0.00%. Pada LDR tertinggi terdapat di kabupaten Lampung

Utara sebesar 90.07%. Sedangkan terendah di kabupaten Way Kanan, Lampung Barat, Mesuji, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat yaitu masing-masing sebesar 0.00%. Pada BOPO tertinggi terdapat di kota Metro yaitu sebesar 194.99%. Sedangkan terendah di kabupaten Mesuji dan Pesawaran yaitu masing-masing sebesar 0.00%. Pada ROA tertinggi terdapat di kabupaten Pringsewu sebesar 3.92%. Sedangkan terendah di kabupaten Mesuji, Pesawaran dan Tulang Bawang Barat yaitu masing-masing sebesar 0.00%. Pada ROE tertinggi terdapat di kabupaten Lampung Selatan sebesar 103.71%. Sedangkan terendah di kabupaten Way Kanan, Lampung Barat, Mesuji, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus dan Tulang Bawang Barat yaitu masing-masing sebesar 0.00%. Dan NPL tertinggi terdapat di kota Bandar Lampung yaitu sebesar 3.00%. Sedangkan terendah di kabupaten Mesuji, Pesawaran, Tulang Bawang Barat yaitu masing-masing sebesar 0.00%.

Pada perkembangannya, Bank Perkreditan Rakyat Di Propinsi Lampung seluruhnya telah mempunyai unit oprasional yang terdiri dari :

1. Seksi Kas / Teller
2. Seksi Pembukuan / Akunting
3. Seksi Dana
4. Seksi Marketing / Kredit / Pembiayaan

Pemilik BPR di Propinsi Lampung Terdiri dari badan usaha dan perorangan yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Pada jajaran pengurus (Dewan Komisariat dan Direksi) sebagian besar terdiri dari mantan praktisi bank umum swasta, pensiunan bank pemerintah, dan mantan pegawai BPR di bidang teknologi.

**Tabel 4.4**  
Rekap Data Jumlah Bank Perkreditan Rakyat Konvensional  
di Wilayah Provinsi Lampung

NO	KABUPATEN	KANTOR PUSAT	KANTOR CABAG	KANTOR KAS	ATM
1	Bandar Lampung	12	3	1	1
2	Metro	2	2	0	1
3	Lampung Tengah	4	3	4	1
4	Lampung Selatan	2	2	1	0
5	Lampung Utara	1	2	0	1
6	Lampung Timur	3	2	3	1
7	Lampung Barat	0	2	0	1
8	Tanggamus	0	0	0	0
9	Tulang Bawang	1	6	0	1
10	Way Kanan	0	3	0	0
11	Pringsewu	0	5	0	0
12	Pesawaran	0	0	0	0
13	Tulang Bawang Barat	0	0	0	0
14	Mesuji	0	0	0	0
	Total	25	30	9	6

Sumber : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Lampung 2014

Kantor Pusat : 25

Kantor Cabang : 30

Kantor Kas : 9

Jumlah Kantor : 64

Dari tabel tersebut dapat di lihat jumlah kantor Bank Perkreditan Rakyat konvensional di wilayah Propinsi Lampung adalah sebanyak 64 kantor dan 6 ATM.

**Tabel 4.5**  
Data Jumlah kantor Bank Perkreditan Rakyat Syariah  
di Wilayah Propinsi Lampung

NO	KABUPATEN	KANTOR PUSAT	KANTOR CABAG	KANTOR KAS	ATM
1	Bandar Lampung	2	0	0	0
2	Metro	1	1	1	0
3	Lampung Tengah	1	1	0	0
4	Lampung Selatan	0	1	0	0
5	Lampung Utara	1	0	1	0
6	Lampung Timur	1	0	0	0
7	Lampung Barat	0	0	0	0
8	Tanggamus	1	0	0	0
9	Tulang Bawang	0	1	0	0
10	Way Kanan	1	0	0	0
11	Pringsewu	0	0	1	0
12	Pesawaran	0	0	0	0
13	Tulang Bawang Barat	0	0	0	0
14	Mesuji	0	0	0	0
	Total	8	4	3	0

Sumber : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Lampung 2014

Kantor Pusat : 8

Kantor Cabang : 4

Kantor Kas : 3

Jumlah Kantor : 15

Dari tabel tersebut dapat dilihat jumlah kantor Bank Perkreditan Rakyat Syariah di wilayah Propinsi Lampung adalah sebanyak 15 kantor. Dengan demikian jumlah

keseluruhan Kantor Bank Perkreditan Rakyat di wilayah Propinsi Lampung sebanyak 79 kantor dengan rincian 64 kantor BPR Konvensional dan 15 kantor BPR Syariah.